



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2025  
KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian hutang pemerintahan desa Tahun 2025 yang belum diselesaikan guna mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Lingga Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tunda Salur Tahun 2025 Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

| No | Jabatan                          | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |       |

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 36);
  8. Peraturan Bupati Lingga Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 Nomor 428);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2025 KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Jabatan                          | Paraf              |
|----|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabut fungsional | <i>[Signature]</i> |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                | <i>[Signature]</i> |

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Lingga.
8. Camat adalah camat se- Kabupaten Lingga.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

| No | Jabatan                         | Paraf                                                                                 |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kaubbag/Kasi/Pelihat fungsional |  |
| 2. | Kaubbag Umum OPD                |  |

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagihasilpajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
21. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
22. Rencana Anggaran Kas Desa Perubahan yang selanjutnya disebut RAK Desa Perubahan adalah dokumen yang memuat Perubahan arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

## BAB II PENGUNAAN

### Pasal 2

- (1) ADD Tunda Salur Tahun 2026 untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- (2) ADD Tunda Salur Tahun 2026 diprioritaskan untuk penyelesaian hutang dan/atau kegiatan yang belum terealisasi Pemerintahan Desa Tahun 2025.

### BAB III PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD Tunda Salur Tahun 2025 sebesar Rp. 9.311.946.249,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Rincian ADD Tunda Salur Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD tunda salur tahun anggaran 2025 kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran ADD kurang bayar tahun 2025 diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui BPKAD setelah melengkapi Persyaratan :
- Permohonan Kepala Desa;
  - Rekomendasi Camat; dan
  - Rekomendasi DPMD
- (3) Rekomendasi Camat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- Surat permohonan kepala desa;
  - Fotocopy buku bank/print out rekening pemerintah desa;
  - Fotocopy NPWP pemerintah desa;
  - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2025;
  - APBDes perubahan Tahun Anggaran 2025; dan
  - Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dilengkapi dengan berita acara verifikasi.
- (5) Rekomendasi DPMD sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila persyaratan telah dilengkapi antara lain :
- Rekomendasi dari camat beserta kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - Berita acara verifikasi dari kecamatan.
- (6) Penyaluran ADD Tunda Salur tahun 2025 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana yang disalurkan ke rekening kas desa.
- (7) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilampirkan dokumen sebagai berikut :
- Rekomendasi penyaluran dari DPMD;

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabab fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- b. Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Form ceklist kelengkapan persyaratan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Foto copi Rekomendasi dari Camat disertai dengan Berita Acara Verifikasi dari kecamatan;
- e. Fotocopy NPWP Pemerintah Desa; dan
- f. Fotocopy buku bank/Rekening Koran Desa.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI LINGGA,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,

*[Handwritten signature]*  
ARMILA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 430

| No | Jabatan                          | Paraf                          |
|----|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                | <i>[Handwritten signature]</i> |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
 NOMOR : 16 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2026

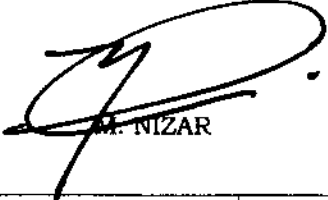
**RINCIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2025**

| No          | KECAMATAN/ DESA        | PAGU ADD PERUBAHAN      | REALISASI               | TUNDA SALUR             |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           | 2                      | 3                       | 4                       | 5                       |
| <b>I</b>    | <b>SINGKEP</b>         | <b>Rp 2.699.847.253</b> | <b>Rp 2.206.154.196</b> | <b>Rp 493.693.057</b>   |
| 1           | Batu Berdaun           | 1.073.084.479           | Rp 881.992.308          | Rp 191.092.171          |
| 2           | Tanjung Harapan        | 885.387.384             | Rp 720.189.370          | Rp 165.198.014          |
| 3           | Batu Kacang            | 741.375.390             | Rp 603.972.518          | Rp 137.402.872          |
| <b>II</b>   | <b>LINGGA</b>          | <b>Rp 6.714.699.386</b> | <b>Rp 5.470.634.510</b> | <b>Rp 1.244.064.876</b> |
| 1           | Pekajang               | 605.709.890             | Rp 491.893.616          | Rp 113.816.274          |
| 2           | Kelombok               | 572.294.249             | Rp 469.492.798          | Rp 102.801.451          |
| 3           | Mepar                  | 893.463.088             | Rp 726.433.354          | Rp 167.029.734          |
| 4           | Kelumu                 | 696.353.407             | Rp 564.949.326          | Rp 131.404.081          |
| 5           | Mentuda                | 849.460.875             | Rp 691.428.986          | Rp 158.031.889          |
| 6           | Merawang               | 683.761.050             | Rp 561.460.786          | Rp 122.300.264          |
| 7           | Panggak Darat          | 623.057.786             | Rp 509.136.508          | Rp 113.921.278          |
| 8           | Panggak Laut           | 603.918.594             | Rp 485.084.288          | Rp 118.834.306          |
| 9           | Musai                  | 615.040.741             | Rp 502.171.590          | Rp 112.869.151          |
| 10          | Nerekeh                | 571.639.706             | Rp 468.583.258          | Rp 103.056.448          |
| <b>III</b>  | <b>SENAYANG</b>        | <b>Rp 2.939.182.717</b> | <b>Rp 2.552.806.908</b> | <b>Rp 386.375.809</b>   |
| 1           | Mamut                  | 616.810.487             | Rp 499.678.518          | Rp 117.131.969          |
| 2           | Laboh                  | 852.878.023             | Rp 837.669.348          | Rp 15.208.675           |
| 3           | Penaah                 | 670.134.102             | Rp 556.618.906          | Rp 113.515.196          |
| 4           | Baran                  | 799.360.105             | Rp 658.840.136          | Rp 140.519.969          |
| <b>IV</b>   | <b>SINGKEP BARAT</b>   | <b>Rp 7.429.221.403</b> | <b>Rp 6.080.706.245</b> | <b>Rp 1.348.515.158</b> |
| 1           | Bakong                 | Rp 679.444.166          | Rp 562.991.337          | Rp 116.452.829          |
| 2           | Kuala Raya             | Rp 612.365.165          | Rp 504.357.931          | Rp 108.007.234          |
| 3           | Marok Tua              | Rp 866.392.716          | Rp 740.841.493          | Rp 125.551.223          |
| 4           | Sungai Buluh           | Rp 703.182.797          | Rp 569.120.718          | Rp 134.062.079          |
| 5           | Sungai Raya            | Rp 634.022.347          | Rp 512.868.358          | Rp 121.153.989          |
| 6           | Sungai Harapan         | Rp 794.369.791          | Rp 644.828.708          | Rp 149.541.083          |
| 7           | Jagoh                  | Rp 614.961.414          | Rp 503.550.631          | Rp 111.410.783          |
| 8           | Tinjul                 | Rp 661.411.717          | Rp 538.922.142          | Rp 122.489.575          |
| 9           | Langkap                | Rp 634.199.761          | Rp 508.899.649          | Rp 125.300.112          |
| 10          | Tanjung Irat           | Rp 670.242.785          | Rp 542.049.022          | Rp 128.193.763          |
| 11          | Bukit Belah            | Rp 558.628.744          | Rp 452.276.256          | Rp 106.352.488          |
| <b>V</b>    | <b>LINGGA UTARA</b>    | <b>Rp 6.601.161.460</b> | <b>Rp 5.370.786.515</b> | <b>Rp 1.230.374.945</b> |
| 1           | Bukit Harapan          | Rp 671.514.002          | Rp 545.850.388          | Rp 125.663.614          |
| 2           | Duara                  | Rp 773.905.371          | Rp 629.253.769          | Rp 144.651.602          |
| 3           | Limbung                | Rp 955.632.702          | Rp 785.184.553          | Rp 170.448.149          |
| 4           | Resun                  | Rp 681.773.810          | Rp 554.638.338          | Rp 127.135.472          |
| 5           | Sekanah                | Rp 701.802.674          | Rp 574.011.888          | Rp 127.790.786          |
| 6           | Linau                  | Rp 642.507.267          | Rp 523.899.172          | Rp 118.608.095          |
| 7           | Sungai Besar           | Rp 654.940.068          | Rp 526.648.972          | Rp 128.291.096          |
| 8           | Rantau Panjang         | Rp 695.091.195          | Rp 559.410.119          | Rp 135.681.076          |
| 9           | Resun Pesisir          | Rp 823.994.371          | Rp 671.889.316          | Rp 152.105.055          |
| <b>VI</b>   | <b>SINGKEP PESISIR</b> | <b>Rp 3.777.681.493</b> | <b>Rp 3.053.699.668</b> | <b>Rp 723.981.825</b>   |
| 1           | Berindat               | Rp 614.479.425          | Rp 495.113.138          | Rp 119.366.287          |
| 2           | Sedamai                | Rp 688.619.641          | Rp 560.140.868          | Rp 128.478.773          |
| 3           | Lanjut                 | Rp 645.347.913          | Rp 525.572.514          | Rp 119.775.399          |
| 4           | Kote                   | Rp 655.660.927          | Rp 530.064.910          | Rp 125.596.017          |
| 5           | Persing                | Rp 587.965.628          | Rp 474.132.404          | Rp 113.833.224          |
| 6           | Pelakak                | Rp 585.607.959          | Rp 468.675.834          | Rp 116.932.125          |
| <b>VII</b>  | <b>LINGGA TIMUR</b>    | <b>Rp 5.180.012.725</b> | <b>Rp 4.222.871.107</b> | <b>Rp 957.141.618</b>   |
| 1           | Bukit Langkap          | Rp 572.463.249          | Rp 466.235.574          | Rp 106.227.675          |
| 2           | Keton                  | Rp 590.608.558          | Rp 477.192.602          | Rp 113.415.956          |
| 3           | Pekaka                 | Rp 612.273.109          | Rp 492.747.220          | Rp 119.525.889          |
| 4           | Kerandin               | Rp 694.451.337          | Rp 564.489.330          | Rp 129.962.007          |
| 5           | Sungai Pinang          | Rp 715.601.797          | Rp 581.428.842          | Rp 134.172.955          |
| 6           | Kudung                 | Rp 733.147.620          | Rp 608.228.215          | Rp 124.919.405          |
| 7           | Teluk                  | Rp 632.119.772          | Rp 514.738.262          | Rp 117.381.510          |
| 8           | Belungkur              | Rp 629.347.283          | Rp 517.811.062          | Rp 111.536.221          |
| <b>VIII</b> | <b>SELAYAR</b>         | <b>Rp 2.622.068.664</b> | <b>Rp 2.135.325.178</b> | <b>Rp 486.743.486</b>   |
| 1           | Selayar                | Rp 633.263.296          | Rp 515.415.328          | Rp 117.847.968          |
| 2           | Penuba                 | Rp 749.163.801          | Rp 609.720.382          | Rp 139.443.419          |
| 3           | Penuba Timur           | Rp 612.852.630          | Rp 497.592.624          | Rp 115.260.006          |
| 4           | Pantai Harapan         | Rp 626.788.937          | Rp 512.596.844          | Rp 114.192.093          |

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

|             |                        |           |                       |           |                       |           |                      |
|-------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| <b>IX</b>   | <b>SINGKEP SELATAN</b> | <b>Rp</b> | <b>1,988,594,089</b>  | <b>Rp</b> | <b>1,617,495,698</b>  | <b>Rp</b> | <b>371,098,391</b>   |
| 1           | Marok Kecil            | Rp        | 752,094,998           | Rp        | 612,547,636           | Rp        | 139,547,362          |
| 2           | Pulau Lalang           | Rp        | 591,008,224           | Rp        | 480,255,832           | Rp        | 110,752,392          |
| 3           | Resang                 | Rp        | 645,490,867           | Rp        | 524,692,230           | Rp        | 120,798,637          |
| <b>X</b>    | <b>KEP. POSEK</b>      | <b>Rp</b> | <b>2,046,768,078</b>  | <b>Rp</b> | <b>1,678,733,466</b>  | <b>Rp</b> | <b>368,034,612</b>   |
| 1           | Busung Panjang         | Rp        | 621,398,250           | Rp        | 510,206,192           | Rp        | 111,192,058          |
| 2           | Posek                  | Rp        | 859,782,804           | Rp        | 710,438,608           | Rp        | 149,344,196          |
| 3           | Suak Buaya             | Rp        | 565,587,024           | Rp        | 458,088,666           | Rp        | 107,498,358          |
| <b>XI</b>   | <b>KATANG BIDARE</b>   | <b>Rp</b> | <b>3,217,651,563</b>  | <b>Rp</b> | <b>2,675,778,671</b>  | <b>Rp</b> | <b>541,872,892</b>   |
| 1           | Benan                  | Rp        | 624,053,433           | Rp        | 520,409,079           | Rp        | 103,644,354          |
| 2           | Mensanak               | Rp        | 812,881,791           | Rp        | 671,118,194           | Rp        | 141,763,597          |
| 3           | Pulau Bukit            | Rp        | 597,448,767           | Rp        | 491,436,092           | Rp        | 106,012,675          |
| 4           | Pulau Duyung           | Rp        | 564,994,209           | Rp        | 469,809,568           | Rp        | 95,184,641           |
| 5           | Pulau Medang           | Rp        | 618,273,363           | Rp        | 523,005,738           | Rp        | 95,267,625           |
| <b>XII</b>  | <b>BAKUNG SERUMPUN</b> | <b>Rp</b> | <b>4,559,706,437</b>  | <b>Rp</b> | <b>3,780,298,784</b>  | <b>Rp</b> | <b>779,407,653</b>   |
| 1           | Batu Belubang          | Rp        | 855,096,361           | Rp        | 690,795,634           | Rp        | 164,300,727          |
| 2           | Cempa                  | Rp        | 627,466,420           | Rp        | 515,069,350           | Rp        | 112,397,070          |
| 3           | Pasir Panjang          | Rp        | 741,439,227           | Rp        | 606,385,894           | Rp        | 135,053,333          |
| 4           | Tanjung Kelit          | Rp        | 787,451,901           | Rp        | 651,636,517           | Rp        | 135,815,384          |
| 5           | Tanjung Lipat          | Rp        | 656,336,618           | Rp        | 541,973,246           | Rp        | 114,363,372          |
| 6           | Rejai                  | Rp        | 891,915,910           | Rp        | 774,438,143           | Rp        | 117,477,767          |
| <b>XIII</b> | <b>TEMIANG PESISIR</b> | <b>Rp</b> | <b>2,177,034,932</b>  | <b>Rp</b> | <b>1,796,393,005</b>  | <b>Rp</b> | <b>380,641,927</b>   |
| 1           | Temiang                | Rp        | 634,731,635           | Rp        | 527,258,712           | Rp        | 107,472,923          |
| 2           | Tajur Biru             | Rp        | 804,254,608           | Rp        | 654,192,720           | Rp        | 150,061,888          |
| 3           | Pulau Batang           | Rp        | 738,048,689           | Rp        | 614,941,573           | Rp        | 123,107,116          |
|             | <b>TOTAL</b>           | <b>Rp</b> | <b>51,953,630,200</b> | <b>Rp</b> | <b>42,641,683,951</b> | <b>Rp</b> | <b>9,311,946,249</b> |

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |